

## ABSTRAK

Tesis ini berjudul **LELANG BENDA SITAAN KASUS KORUPSI SEBELUM ADANYA PUTUSAN PENGADILAN YANG TETAP (*INKRACHT VAN GEWIJSDE*)**. Dengan 2 (dua) pokok permasalahan yaitu: (1) Apakah aparat penegak hukum (KPK) dapat melakukan pelelangan terhadap barang bukti tindak pidana korupsi sebelum adanya putusan yang *inkracht van gewijsd*?; dan (2) Bagaimana perlindungan hukum terhadap pemilik objek lelang oleh aparat hukum (KPK) yang kemudian perkaranya diputus bebas oleh pengadilan?.

Metode Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Normatis, dengan menggunakan Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute approach*) dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual approach*) yang menggunakan bahan hukum primer dan sekunder.

Berdasarkan hasil penelitian terungkap bahwa Pasal 45 KUHAP tidak mengisyaratkan adanya objek lelang yang dapat dilakukan sebelum adanya putusan pengadilan yang tetap untuk barang bergerak seperti kendaraan bermotor dan kewenangan KPK dalam hal melelang pun tetap diserahkan pada Pejabat Kelas I di KPNKL bukan KPK sendiri yang berhak langsung melelang. Kemudian perlindungan hukum jika terdakwa ingin kembali objek benda sitaan yang telah dilelang dapat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum Pasal 1365 BW dan gugatan pembatalan lelang merujuk pada Pasal 4 dan Pasal 17 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang

**Kata Kunci : Lelang, Benda Sitaan, Komisi Pemberantasan Korupsi, Putusan Pengadilan**

**ABSTRACT**

*This thesis is titled AGAINST THE OBJECTIVES OF CORRUPTION CASE BEFORE THE EXISTENCE OF THE FIXED COURT DECISION (INKRACHT VAN GEWIJSD). With 2 (two) main issues, namely: (1) Can law enforcement officers (KPK) conduct an auction of evidence of corruption before an inkracht van gewijsd?; and (2) What is the legal protection of the owner of the auction object by the legal apparatus (KPK), whose case is subsequently terminated freely by the court ?.*

*This research method uses the normative juridical method, using the statute approach and the conceptual approach that uses primary and secondary legal materials.*

*Based on the results of the study revealed that Article 45 of the Criminal Procedure Code does not indicate the existence of auction objects that can be carried out before the existence of a permanent court decision for movable goods such as motorized vehicles and the authority of the KPK in the case of auctioning to Class I Officials in the KPNKL not the KPK itself. . Then legal protection if the defendant wants to return the object confiscated auctioned can file a lawsuit against the law Article 1365 BW and the auction cancellation claim refers to Article 4 and Article 17 of the Regulation of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia Number 27 / PMK.06 / 2016 concerning Auction Implementation Guidelines*

**Keywords: Auction, Confiscated Objects, Corruption Eradication Commission, Court Decision**